

## **Ekonomi Politik Pengentasan Kemiskinan: Peran Kebijakan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

**Ayu Astri Solissa<sup>1</sup>, Meidita Prasasti Sadewi<sup>2</sup>, Desi Aswalida<sup>3</sup>, Mellyana Candra<sup>4</sup>**

Universitas Maritim Raja Ali Haji, aastrisolissa@student.umrah.ac.id, mprasastisadewi@student.umrah.ac.id, daswalida@student.umrah.ac.id, mellyana1001@gmail.com

---

**Abstract**

Isu kemiskinan merupakan masalah krusial bagi negara berkembang, terutama Indonesia. Hal ini tentu saja akan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan dalam mengkaji pendekatan ekonomi politik melalui kebijakan sosial yang dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis faktor penyebab kemiskinan dan efektivitas kebijakan pemerintah. Penelitian ini memiliki temuan berupa kebijakan sosial dinilai memiliki kontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan, tetapi masih harus menghadapi berbagai tantangan implementasi seperti, keterbatasan anggaran dan sasaran program atau kebijakan yang masih kurang tepat. Sehingga, dalam hal ini diperlukan integrasi kebijakan untuk mewujudkan solusi yang dapat berkelanjutan.

---

**Keywords**

Ekonomi Politik, Kemiskinan, Kebijakan Sosial, Program Sosial

---

**Corresponding Author**

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

---

### **1. INTRODUCTION**

Permasalahan yang sering kali dihadapi terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, ialah permasalahan kemiskinan. Tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan ini cukup meresahkan, karena secara tidak langsung kemiskinan dapat menurunkan tingkat kesejahteraan negara, terutama kesejahteraan pada masyarakatnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi di Negaranya. Namun, tentu saja masih ada berbagai tantangan yang memberikan dampak secara luas bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus siap dalam melakukan upaya terhadap pengentasan kemiskinan.

Di dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan bernegara ialah meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini mencakup bagaimana pembangunan ekonomi di Indonesia dapat menjadi satu proses yang terus berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kemiskinan merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat sehingga mengakibatkan tingginya beban sosial ekonomi, kurangnya partisipasi dari masyarakat, berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat atas pemerintah, serta potensi menurunnya mutu generasi emas dimasa



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

depan. Dengan luasnya dampak dari kemiskinan, maka menjadikan permasalahan yang multidimensional, dimana hal ini menyangkut semua aspek dari kehidupan masyarakat. Mulai dari pendapatan ekonomi yang cenderung lemah, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti aspek sosial dan budaya. Menurut laporan yang diambil dari Bank Dunia, dengan tajuk "*Riding the waves: The East Asian Miracle in the 21st century.*" Negara Indonesia termasuk kedalam kategori yang meresahkan, dimana jika dibandingkan dengan negara ASEAN saja, tingkat kemiskinan di Indonesia cukup ekstrim yaitu sebesar 7,5% yang hanya lebih baik dari negara Laos. Hal ini juga berlaku pada proporsi miskin moderat, yang mana Indonesia mencapai angka 24,6% dan hanya lebih dari Laos. Maka jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Kamboja dengan tingkat kemiskinan 0,7%, serta Thailand dan Malaysia yang telah mencapai *zero extreme poverty*. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal tingkat kemiskinan (Andina & Wahyudi, 2024).

Satu langkah awal yang dapat diterapkan sebagai pendekatan dalam mengatasi masalah kemiskinan, yakni melalui kebijakan sosial yang fokus terhadap pemberdayaan masyarakat serta distribusi kesejahteraan yang cenderung lebih merata. Dalam pengentasan kemiskinan, implementasi terhadap kebijakan sosial tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan ekonomi saja, tetapi juga salah satu bagian dari ekonomi politik yang didalamnya melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga internasional, maupun masyarakatnya sendiri. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, ekonomi politik menjadi aspek penting untuk merancang serta menjalankan kebijakan sosial yang efektif. Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan sosial yang dirancang tidak jarang dapat terpengaruh keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Adanya berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan sosial seperti adanya kekuasaan serta orientasi partai politik, kestabilan politik, maupun hubungan yang terjadi antar lembaga pemerintah dapat menjadikan sejauh mana kebijakan sosial yang dirancang dapat memberikan perubahan pada masyarakat miskin secara signifikan positif atau malah sebaliknya.

Ekonomi politik merupakan disiplin ilmu yang memiliki banyak pendefinisian yang berbeda-beda maknanya oleh setiap ahli politik ataupun ahli ekonomi. Menurut Marx dalam buku karya Barry dan Donald Wittman dengan judul "*The Oxford Handbook of Political Economy*" yang dimana menjelaskan bahwa ekonomi politik adalah kepemilikan suatu alat produksi yang bergantung pada proses sejarah. Adapun menurut Mochtar Mas'oed, ekonomi politik ialah studi yang mengkaji keterkaitan yang terjadi antara fenomena ekonomi dan fenomena politik, antara negara dan pasar, lingkungan internasional dan domestik, serta pemerintah dan masyarakat (Suleman et al., 2021)

Ekonomi politik menurut Caporaso dan Levine, mengemukakan bahwa ekonomi politik membahas dan mengulas keterkaitan atau hubungan disetiap aspek mengenai ekonomi dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aspek yang terdapat didalam ekonomi dan politik selalu

mempunyai hubungan yang saling terikat dan tidak bisa dipisahkan. Hal ini juga dimaknai dengan bahwa setiap proses ekonomi mempunyai hubungan dengan proses politik, dan sebaliknya. Kemudian, proses ekonomi yang berpengaruh pada proses politik, dan begitu juga sebaliknya (Hidayaturrahman & Kom, 2021).

Teori kemiskinan pada umumnya mengacu pada dua paradigma besar yang berpengaruh terhadap pemahaman terkait kemiskinan dan penanggulangannya. Paradigma ini terdiri dari dua yaitu, paradigma Neo-Liberal dan Demokrasi sosial.

### 1. Paradigma Neo-Liberal

Dalam melihat kemiskinan, fokus utama dari paradigma Neo-Liberal ini ialah individu dan mekanisme pasar bebas (Syahyuti, 2006: 95). Paradigma ini meletakkan kebebasan individu menjadi komponen penting di masyarakat. Sehingga, paradigma ini menunjukkan bahwa kemiskinan ialah permasalahan individu yang diakibatkan karena pilihan dari individu tersebut. Pada paradigma ini, strategi penanggulangan kemiskinan sifatnya sementara dan peran dari negara yang cenderung minim, yaitu baru dilakukan jika institusi di masyarakat sudah tidak dapat menangani kemiskinan. Adapun kelemahan dari paradigma ini ialah, hanya melihat kemiskinan yang terjadi melalui pendapat serta kurangnya melibatkan masyarakat miskin sebagai subjek pada permasalahan kemiskinan (Satterthwaite (1997). Sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kemiskinan yang timbul di masyarakat (Ananda Umar et al., 2023)

### 2. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini cenderung melihat kemiskinan sebagai permasalahan struktural dibanding permasalahan individu (Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:79). Paradigma ini melihat bahwa penyebab kemiskinan diakibatkan oleh akses-akses yang tertutup bagi kelompok tertentu. Selain itu, kesetaraan merupakan syarat penting dalam memperoleh kebebasan dan kemandirian (Syahyuti, 2026:95). Dalam paradigma ini, peran pemerintah dikatakan cukup penting untuk menanggulangi kemiskinan dengan merumuskan strategi yang matang. Kemiskinan hendaknya ditangani secara institusional atau melembaga, seperti diselenggarakannya program-program jaminan sosial. Namun, paradigma ini memiliki kelemahan yaitu tingginya ketergantungan pada negara untuk menciptakan struktur serta institusi dalam menangani kemiskinan, padahal hal tersebut secara tepat tergantung kapabilitas dari kelompok miskin. Selain itu, kemiskinan relatif dalam paradigma ini dinilai menyulitkan dalam mewujudkan standar kebutuhan yang diperlukan golongan miskin, karena kemiskinan bukan dilihat dari minimal kebutuhan yang mesti dicapai melainkan pada rata-rata kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup (Febriana, 2010 dalam (Ananda Umar et al., 2023)

Berdasarkan penjelasan terkait, penelitian ini berupaya untuk mengkaji ekonomi politik dalam upaya pengentasan kemiskinan serta kebijakan sosial yang berkontribusi dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan studi literatur terkait pendekatan ekonomi politik dalam pembuatan kebijakan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi terkait penelitian dengan cara yang sistematis, sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat ini, serta akurat dan faktual dari gejala. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui *book survey* atau dengan kata lain, data-data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari berbagai literatur seperti artikel dan jurnal, buku, hasil penelitian sebelumnya, serta catatan dan sebagainya, yang memiliki fokus pembahasan yang sama serta berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Penelitian dengan penerapan metode ini juga bisa disebut dengan studi kepustakaan.

## 3. FINDINGS AND DISCUSSION

### 3.1 Ekonomi Politik dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan menurut Bank Dunia (2015) ialah kondisi seseorang yang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Seperti kesehatan, standart hidup yang layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati oleh orang lain. Kemiskinan adalah satu masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional yang artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam. Secara konseptual, kemiskinan berasal dari permasalahan ekonomi dan sosial. Kemiskinan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu kurangnya pendapatan dan jumlah kalori per individu. Sedangkan sebagai masalah sosial, yaitu sebagai keterbatasan individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena kurangnya pendidikan, sehingga menyulitkan individu untuk mencapai tingkat kebahagian yang sama.

Setiap permasalahan yang timbul memiliki beberapa faktor yang mengiringi sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan, begitu juga kemiskinan. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartono dan Aziz dalam Hudyana (2009):

- 1) Terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat memberikan konsekuensi kemiskinan pada masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dan keterampilan.

- 2) Pendidikan yang rendah, jika dimiliki seseorang dapat menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk kedalam dunia kerja.
- 3) Laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan memperburuk keadaan ekonomi terutama pada jumlah beban yang ditanggung tidak sebanding dengan penghasilan yang minim.
- 4) Kurangnya perhatian dari pemerintah, pemerintah yang kurang memperhatikan kondisi masyarakatnya tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengatasi kelemahan dari kebijakan pengentasan kemiskinan adalah pendekatan ekonomi politik. Pentingnya pendekatan ekonomi politik bahwa pendekatan ekonomi politik dinilai mampu mengatasi kelemahan pendekatan dari segi ekonomi, pendekatan sosial dan kultural, serta pendekatan kemanusian semata. Pendekatan ekonomi politik juga tidak hanya mengatasi kekurangan yang ada dalam ilmu ekonomi tetapi juga kelemahan-kelemahan dalam ilmu politik. Menurut Rachbini, pendekatan ekonomi umumnya hanya menelisik aspek kelembagaan pasar tanpa menyentuh kelembagaan non-pasar. Sementara politik biasanya kekurangan kerangka analisisnya untuk melihat fenomena ekonomi atau dasar institusi pasar. (Rachbini, 1994)

Ekonomi politik melihat kemiskinan tidak hanya sebagai masalah ekonomi semata, tetapi juga sebagai hasil interaksi ekonomi dan politik, termasuk akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Sistem politik digunakan sebagai latar untuk menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi dengan tujuan untuk menjelaskan berbagai tindakan ekonomi oleh aktor-aktor tertentu dalam aktivitas politiknya.

Salah satu aspek penting dalam menyikapi pengentasan kemiskinan tersebut tidak terputus dari peranan kebijakan oleh pemerintah. Peran kebijakan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dengan berbagai fungsi utama. Berikut beberapa peran kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

- a) Penyediaan jaminan sosial seperti program jaminan kesehatan, pensiun dan bantuan sosial memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, dan mengurangi ketidakpastian dan ketidaksetaraan.
- b) Akses pendidikan yang memadai. Program-program pendidikan seperti kebijakan pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar, peningkatan efektivitas program Bidik Misi, penataan asistensi sosial (Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera), serta program perluasan cakupan kepeserataan jaminan sosial

dan data kependudukan jaminan sosial. Program-program tersebut setidaknya dapat membantu akses pendidikan di Indonesia untuk masyarakat miskin.

- c) Peningkatan kesehatan masyarakat. Melalui fasilitas kesehatan dan program pencegahan penyakit, kualitas hidup meningkat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi produktif dalam ekonomi dan sosial.
- d) Pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik membantu masyarakat menjadi mandiri dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- e) Pengurangan kemiskinan langsung. Kebijakan ini sudah diterapkan melalui program pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai, subsidi pangan, dan bantuan perumahan memberikan dukungan nyata bagi keluarga miskin dan program-program jaminan sosial lainnya diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan.

Untuk memperkuat program-program pengentasan kemiskinan tersebut, pemerintah juga mendorong kebijakan kemiskinan terkait revolusi mental diantaranya melalui:

1. Redesign program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat;
2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, serta;
3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat.

Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan program ditingkat desa untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dinas sosial di daerah juga berperan penting dalam pelaksanaan program tersebut melalui pemberdayaan masyarakat dan penyaluran bantuan sosial, namun terdapat beberapa tantangan seperti data penduduk yang tidak akurat dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam efektivitas pengentasan kemiskinan

### **3.2 Bentuk dan Peran Kebijakan Pengentasan Kemiskinan**

Bentuk kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia umumnya terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu kuratif dan preventif. Pendekatan kuratif berfokus pada pemberian bantuan langsung kepada Masyarakat miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi sembako. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat miskin secara langsung. Sementara itu, pendekatan preventif lebih kepada upaya pemberdayaan Masyarakat melalui program seperti Kartu Pekerja, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelatihan

keterampilan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Masyarakat agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing. Dalam penelitian ini, instrument kuesioner berbasis skala likert digunakan untuk mengukur persepsi Masyarakat terhadap kebijakan tersebut, mencangkup aspek seperti desain program, aksesibilitas, keberlanjutan dan dampak langsung. Selain itu, analisis spasial juga dilakukan untuk melihat perbedaan implementasi kebijakan di wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga bisa memberikan Gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia (Mawardi & Pratama, 2023).

Peran kebijakan pengentasan kemiskinan dapat diukur melalui beberapa indikator kuantitatif, seperti peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan keterampilan kerja, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta penurunan jumlah pengangguran di kelompok rentan. Berdasarkan survei terhadap masyarakat penerima manfaat, program bantuan langsung cenderung memberikan dampak yang lebih cepat dirasakan, tetapi hanya bersifat jangka pendek dan berisiko menciptakan ketergantungan pada bantuan tersebut.

Sementara itu, program berbasis pemberdayaan membutuhkan waktu lebih lama untuk memperlihatkan hasilnya, tetapi berpotensi memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Analisis data survei dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif, seperti frekuensi, persentase, dan mean, untuk mengidentifikasi kecenderungan umum dari respon responden. Hasil analisis ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk tabel dan diagram batang atau pie chart untuk memperjelas temuan dan mempermudah pemahaman (Mawardi & Pratama, 2023).

### **3.3 Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Kebijakan pengentasan kemiskinan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara umum, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan distribusi, serta keterbatasan informasi dan akses di daerah terpencil. Selain itu, banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk menjadi mandiri secara ekonomi karena kurangnya pendidikan, pelatihan lanjutan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat integrasi antar program agar sinergi antar kebijakan dapat lebih optimal. Kedua, sistem verifikasi penerima manfaat perlu ditingkatkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ketiga, perluasan kemitraan dengan sektor swasta dan social enterprise juga penting untuk mendukung keberlanjutan program. Dengan kolaborasi multisektor yang didukung data kuantitatif yang akurat, kebijakan pengentasan kemiskinan dapat

menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia dapat lebih efektif dan berdampak jangka panjang (Mawardi & Pratama, 2023).

#### 4. CONCLUSION

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan bersifat multidimensional yang disebabkan karena berbagai faktor struktural seperti, lapangan kerja yang sedikit, rendahnya tingkat pendidikan, serta peran negara yang masih lemah dalam pendistribusian kesejahteraan. Selain itu, kebijakan sosial baik itu kuratif atau bantuan langsung dan preventif yaitu pemberdayaan sama-sama mempunyai peran yang penting dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ekonomi politik menyuguhkan landasan yang kuat dalam aspek merancang kebijakan pengentasan kemiskinan, dan mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, serta institusional yang terpadu. Walaupun berbagai program sosial telah diselenggarakan, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti, pendampingan yang kurang, data-data yang belum akurat, serta terbatasnya anggaran.

#### REFERENCES

- Ananda Umar, D., Mukramin, un, Arifin, J., Aziz, F., Sultan Alauddin No, J., Sari, G., Rappocini, K., Makassar, K., & Selatan Korespondensi penulis, S. (2023). Kemiskinan Masyarakat Urban Makassar. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 12–25. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.339>
- Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01). <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1066>
- Hidayaturrahman, M. (2021). *MI POLITIK PEMBANGUNAN*. Unitomo Press.
- Mawardi, R. A., & Pratama, M. R. (2023). Peran Social Enterprise sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Studi Inovasi*, 3(1), 31–42. <https://doi.org/10.52000/jsi.v3i1.130>
- Suleman, N. H., Parenrengi, F., & Kurniawan Oelfa, T. (2021). EKONOMI POLITIK INDONESIA SAATINI, KEBIJAKAN, PENERAPAN SERTA TANGGAPAN MASYARAKAT KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO. In *Journal of Islamic Economics Law* (Vol. 1, Issue 1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Faisal fadillah, Hendra Gunawan, 2 Desember 2020, Mengkaji Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik, *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Vol. 4, Hal 133-154.

Perpustakaan universitas islam riau, tahun 2020,"Jurnal Pengentasan Kemiskinan", hal, 15-40.